BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya pertolongan manusia lain. Hal ini pernah dipaparkan oleh seorang ahli filsuf Yunani yaitu Aristoteles bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, yang berarti manusia adalah makhluk sosial dan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya manusia lain.¹ seperti dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu bentuk upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan menggunakan fasilitas pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan seperti koperasi.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan susunan perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Dari berbagai macam lembaga keuangan yang ada baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, koperasi merupakan salah satu urat nadi

¹ Matroji, "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Permatatabank Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (studi kasus koperasi karyawan permatatabank bintaro)", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 4 No. 1 Juli 2017, Hlm 20.

perekonomian bangsa. Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya mengatur perikehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang di dalam gerak pelaksanaannya didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi. Artinya, usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi warga negara Indonesia harus dilakukan melalui usaha bersama. Dengan demikian kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama melalui suatu organisasi kerjasama, yang bergerak di bawah pimpinan dan pengawasan secara demokratis oleh warga atau anggota masyarakat sendiri.² Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.³ Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.⁴

Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memberikan pengertian terhadap koperasi yaitu pada Pasal 1 butir (1) yang

² Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Cet 2, BPFE, Yogyakarta, 2015, hal.30.

³*Ibid.*, hal.23.

⁴*Ibid.*

menyatakan bahwa: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Berikut adalah pengertian koperasi untuk mengenal koperasi lebih jauh:

“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.”⁵

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional, koperasi harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak koperasi bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara

⁵*Ibid.*, hal.22.

langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat.

Di kota Jambi salah satu koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero. Dalam melakukan kegiatannya agar program dapat berjalan dengan baik dan optimal, diperlukan pengaturan hubungan hukum melalui perjanjian antara koperasi sebagai pemberi bantuan pinjaman dana kepada pelaku usaha sebagai penerima dana pinjaman.

Berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan karena tujuan dari adanya hukum perjanjian diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, keadilan, prediktabilitas, kemanfaatan dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola risiko oleh karena besarnya tujuan yang akan dicapai melalui adanya perjanjian tersebut, maka segala hal yang mendukung berjalannya suatu perjanjian harus diperhatikan secara cermat dan dipersiapkan secara matang.⁶

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero, Kreditur dan Debitur menggunakan Surat Perjanjian Pinjaman.

Melalui perjanjian atau kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian atau kontrak. Hukum perjanjian dianut di Indonesia bersifat terbuka yang artinya ada pemberian kebebasan yang seluas-luasnya

⁶ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum Universitas Dirgantara*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, Hlm. 102.

kepada siapa pun membuat perjanjian dengan isi yang sifatnya sesuai yang dikehendaki asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷

Dalam Surat Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak disebutkan, bahwa debitur akan membayar hutang debitur secara berangsur-angsur setiap hari sampai limit 3 bulan dan sesuai dengan plafon debitur. Apabila terjadinya pembayaran terlambat maka nasabah meminta tempo waktu untuk membayar. Perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero menggunakan fotocopy ktp dan materai sebagai syarat mengajukan pinjaman. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero membantu debitur untuk menambah modal usaha atau investasi. Jika pinjaman debitur di bawah Rp.3.000.000 perjanjian pinjaman dilakukan hanya kepada koperasi saja, jika pinjaman debitur di atas Rp.3.000.000 maka perjanjian pinjaman tersebut juga dilakukan dihadapan pimpinan perusahaan. Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero termasuk pinjaman dalam jumlah besar dengan besar pinjaman mencapai Rp.50.000.000. Bunga dari pinjaman debitur sebesar 20% sesuai dengan berapa pinjaman yang diajukan oleh debitur.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara pengertian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan

⁷Chrystofer, Ery Agus P dan Rinitami N. "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador Jakarta)". *Diponegoro Law Journal Universitas Diponegoro*, Vol 6 No. 2 Tahun 2017, Hlm. 2.

syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁸

Isi dari suatu perjanjian tertulis harus ditaati oleh kedua belah pihak karena hal tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya mementingkan motif ekonomi. Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan, koperasi juga memiliki motif sosial. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial tidak dapat dipisahkan. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut :⁹

1. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berkemanusiaan;
2. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil;
3. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya;
4. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah;
5. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya;

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 125.

⁹ Revrison Baswir, *Op. Cit.*, hal.52.

6. Menyederhanakan dan mengefisiensikan system tata niaga, yaitu dengan cara;
7. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan;
8. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.

Sebagaimana halnya peran koperasi dalam bidang ekonomi, fungsi koperasi dalam bidang sosial pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Fungsi koperasi dalam bidang sosial dalam garis besar adalah sebagai berikut : ¹⁰

1. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial yang lebih berperikemanusiaan.
2. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab
3. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun di atas hubungan-hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan
4. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang menjamin dilindunginya hak dan kewajiban setiap orang

¹⁰ *Ibid.*, hal.54.

5. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero berupaya memberikan pelayanan yang terpercaya dan profesional. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero memiliki misi memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan dan dukungan agar berhasil di sektor perekonomian. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada anggota atau masyarakat. Modal Koperasi terdiri atas Simpanan Pokok yang dibayar sekali pada awal menjadi anggota dan Simpanan Wajib yang dibayar selama menjadi anggota dengan jangka waktu tertentu sesuai keputusan rapat anggota serta Simpanan Sukarela yang dibayar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dalam menjalankan aktivitasnya memberikan dukungan permodalan kepada Debitur. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dan debitur, memuat hak dan kewajiban para pihak yang terkait.

Seiring dengan berkembangnya Koperasi, maka tingkat kepercayaan masyarakat terus meningkat, sehingga Koperasi dapat diposisikan sebagai suatu koperasi yang mengusung pola-pola pembiayaan yang terkini dengan penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

Penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero Cabang Jambi beralamat di Jl. Rd. Abdurrahman RT.014 Kel. Simpang rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Dimana dalam perjanjian pinjaman antara debitur dan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero cabang Jambi yang merupakan koperasi yang mempunyai perusahaan sendiri bukan dalam berbentuk CV(commanditaire vennootschap) melainkan berbentuk PT(perseroan terbatas) dalam hal membiayai debitur untuk penambahan modal kerja atau investasi. Total nasabah pada tahun 2022 terdapat 40 nasabah, total nasabah bermasalah terdapat 12 nasabah.

Tabel
Jumlah Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero
Di Kota Jambi yang jatuh Tempo Pinjaman Tahun 2022

No	Nama Nasabah	Jumlah Pinjaman	Total Tunggakan	Jangka Waktu
1	Riza	Rp.1.000.000	Rp.400.000	3 bulan
2	Hendri Afdal	Rp.500.000	Rp.340.000	3 bulan
3	Yuliarni	Rp.1.500.000	Rp.600.000	3 bulan
4	Yulian	Rp.5.000.000	Rp.3.900.000	3 bulan
5	Katrin	Rp.1.000.000	Rp.560.000	3 bulan
6	Selvi	Rp.5.000.000	Rp.4.500.000	3 bulan
7	Awaludin	Rp.1.500.000	Rp.900.000	3 bulan
8	Siti Aisah	Rp.5.000.000	Rp.4.000.000	3 bulan
9	Kartika	Rp.3.000.000	Rp.1.800.000	3 bulan
10	Tasminah	Rp.4.000.000	Rp.3.200.000	3 bulan
11	Dahlia	Rp.3.500.000	Rp.2.000.000	3 bulan
12	Ayu	Rp.1.500.000	Rp.750.000	3 bulan

Sumber : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero Kota Jambi

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dapat diketahui bahwa ada beberapa debitur yang mengalami kredit bermasalah. Jumlah kredit yang diambil mulai dari Rp.500.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,-. Lama tunggakan pembayaran kredit dari debitur mulai dari hari ke-2 tanggal jatuh tempo dan ada yang menunggak sampai 31 hari

Ketidak mampuan membayar angsuran kredit oleh debitur menjadi gejala awal adanya wanprestasi. Salah satu penyebab debitur tersebut mengalami kredit bermasalah dikarenakan kebanyakan omzet usaha mereka menurun sehingga mempengaruhi pembayaran kredit yang mereka ambil.

Terkait dengan hal ini, penulis ingin meneliti lebih dalam melalui penelitian yang berjudul "**Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dengan Debitur Di Kota Jambi**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dengan debitur di Kota Jambi?
2. Apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dengan debitur di Kota Jambi dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dengan debitur Di Kota Jambi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dengan debitur di Kota Jambi dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Perjanjian.
- b. Secara Praktis hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang berkaitan dengan tidak terlaksananya perjanjian pinjaman antara Koperasi dengan debitur.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, beberapa konsep penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana yang berarti: “kegiatan dan pelaksanaan itu sendiri memiliki arti proses dan cara melaksanakan”.¹¹

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdiknas, Jakarta, 2008, hal. 625.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Pinjaman

Pengertian pinjaman menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam(debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹²

Adapun pengertian pinjaman menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 : “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.¹³

Di dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban

¹² Eddi Rinaldy, *Membaca Neraca Bank*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), Hal. 29

¹³ Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat (11)

melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah Bunga yang telah ditetapkan.¹⁴

Pinjaman adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggukan pada suatu jangka yang disepakati.¹⁵

3. Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 butir (1) pengertian Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

4. Debitur

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 butir (3) pengertian Debitur yaitu:

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian pinjaman dalam hal tidak

¹⁴ Ibid., hal. 7

¹⁵ Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perpinjaman: Bagi Bank Komersial, (Yogyakarta: BPFE, 2001), Hal. 9

terlaksananya perjanjian yang terjadi pada pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dengan Debitur di Kota Jambi serta upaya penyelesaiannya.

F. Landasan Teori

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori perjanjian dan kepastian hukum.

1. Teori Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari empat buku, dimana di dalam Buku Ketiga diatur tentang Perikatan atau Perjanjian. Perikatan ialah ikatan dalam bidang harta benda (*vermogens recht*) antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakannya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat unsur-unsur perjanjian yang meliputi:

- a. Adanya para pihak
- b. Adanya persetujuan antara para pihak
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang akan dicapai
- e. Adanya bentuk tertentu
- f. Adanya syarat-syarat tertentu

Dalam pelaksanaan perjanjian tidak jarang ditemui adanya suatu perbuatan. yang telah ditentukan dalam perjanjian yang diadakan.dalam suatu

perjanjian adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Untuk melaksanakan prestasi tersebut tidak hanya apa yang telah ditetapkan secara tegas dan cermat dalam isi perjanjian tetapi juga meliputi segala apa yang harus dilaksanakan menurut sifat kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang dan ini semua harus dilaksanakan dengan itikad baik. Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah dilakukan selayaknya atau sepatutnya harus dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Jadi apabila ada prestasi tersebut di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang mengadakan perjanjian, maka perbuatan tidak melaksanakan itulah dinamakan dengan wanprestasi.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Suatu perjanjian yang sah tidak hanya terjadi dengan adanya subjek saja tanpa adanya apa yang diperjanjikan, maka apa-apa yang diperjanjikan oleh subjek disebut objek perjanjian, dengan demikian objek perjanjian adalah berupa prestasi yang dilakukan oleh subjek yang mengadakan perjanjian.

Mengenai definisi perjanjian tersebut di atas, ditegaskan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih. Pengertian yang diberikan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menimbulkan banyak pengertian dari para sarjana, khususnya sarjana hukum itu sendiri, yang antara lain

Subekti mengatakan: “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁶

Teori dasar yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah asas *Facta Sunt Servanda*, yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan ketentuan tersebut dapat kita lihat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat (4) syarat seperti yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan keempat syarat sah perjanjian tersebut, syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang diperjanjikan.

¹⁶ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 1

Perjanjian dapat menimbulkan wanprestasi, tidak terkecuali dalam perjanjian kredit. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa, jadi di luar kemauan debitur, debitur tidak bersalah.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan “ adanya tiga cita (idée) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹⁸

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.¹⁹

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.20.

¹⁸ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hlm.79.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²⁰

Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang.²¹

Dalam masalah perlindungan hukum, maka terkait dua pihak yaitu korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang memberi perlindungan. Hal ini karena pemerintah atau negaralah yang mempunyai kekuasaan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini dilakukan untuk membandingkan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini agar menghindari adanya permasalahan yang dikaji sama. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang persis dilakukan, maka dari itu penulis mencantumkan tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitas dari penelitian penulis sebagai berikut :

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

²¹ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

1. Proses Penyelesaian Pinjam Meminjam Bila Terjadi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Beringin Jaya Palembang oleh Diani Febrina Adhisty, Fakultas Hukum Tahun 2018 Universitas Sriwijaya, Penelitian ini berlokasi di Palembang dan Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana karakteristik perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Beringin Jaya Palembang? Dan Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan pihak kreditur dalam menyelesaikan perjanjian pinjam meminjam jika debitur wanprestasi? Memiliki persamaan dengan skripsi penulis yaitu dengan menggunakan metode analisis yuridis empiris, sama sama dilakukan dengan pengambilan data secara langsung kelapangan dan memperoleh keterangan informasi dengan menggunakan hasil wawancara hasil dari penelitian ini mengetahui bagaimana karakteristik perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur dan mengetahui bagaimana tahap proses penyelesaian yang dilakukan antara kreditur dan debitur.
2. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jaminan Fidusia Di Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah oleh Ratna Wijyanthi, Fakultas Hukum Tahun 2009 Universitas Sebelas Maret, Penelitian ini berlokasi di Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah dan permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana prosedur perjanjian pinjam-meminjam dengan

jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah? Bagaimana bentuk perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah? Permasalahan apa yang timbul apabila terjadi wanprestasi dan risiko dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah? Memiliki perbedaan dengan skripsi penulis yaitu dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, sama-sama dilakukan dengan pengambilan data secara langsung kelapangan dan memperoleh keterangan informasi dengan menggunakan hasil wawancara hasil dari penelitian ini bagaimana bentuk perjanjian pinjam meminjam di Koperasi simpan pinjam (KSP) Ibnu Khaldun, dan bentuk permasalahan apa yang timbul bila terjadinya wanprestasi.

3. Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia oleh Ari Anisa Fitri, Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2017 penelitian ini berlokasi Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Tanah Datar Sumatera Barat dan permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana analisis Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari hukum perikatan? Bagaimana Akibat Hukum dari Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi

Pasar Makmur Tabek Patah? Memiliki perbedaan dengan skripsi penulis yaitu dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, dimana dilakukan suatu proses menemukan aturan hukum yang dilakukan guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dalam peraturan perundang-undangan, dan memiliki persamaan yaitu melakukan wawancara terhadap debitur dan memperoleh informasi bagaimana bentuk perjanjian pinjam meminjam di koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero cabang Jambi yang beralamat di Jl. Rd. Abdurrahman RT.014 Kel. Simpang rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat, atau fakta tentang berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat.²² Dalam hal ini penulis meneliti Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero Dengan Debitur di Kota Jambi.

3. Sumber Data

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.135.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara dengan subyek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan adapun bahan-bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum terdiri dari antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu meneliti peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur berupa buku, makalah, skripsi dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah anggota koperasi (peminjam) yang bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero di Kota Jambi.

Jumlah nasabah bermasalah pada tahun 2022 ada 40 nasabah, sampel dalam penelitian ini adalah 12 nasabah dikategorikan macet. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap informan yaitu :

- a. Branch Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero Cabang Jambi
- b. Financing Officer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero Cabang Jambi

5. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan memaparkan dalam bentuk kualitatif terhadap objek yang didasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang tampak pada objek tersebut. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu dalam bentuk pernyataan.

I. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan untuk dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai penelitian yang dilakukan penulis. Adapun

sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab yang tiap babnya memiliki sub bab masing-masing. Untuk memudahkan memahami penulisan. Sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya meliputi Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan tentang Perjanjian, Pembiayaan dan Koperasi. Pada Bab ini memuat Tinjauan Tentang Perjanjian, Tinjauan Tentang Pembiayaan, Tinjauan Tentang Koperasi.

Bab III Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dengan Debitur di Kota Jambi. Pada Bab ini penulis membahas tentang Hak dan Kewajiban dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dengan Debitur di Kota Jambi, serta faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kozero dengan Debitur di Kota Jambi dan upaya penyelesaiannya.

Bab IV Penutup. Pada Bab ini memuat kesimpulan dan saran.